

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA DAN PRINSIP- PRINSIP ASEAN

A. POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA

Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain dalam rangka mendapatkan suatu hal atau kepentingan. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) adalah suatu perangkat formula, nilai, sikap, dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional¹¹.

Politik luar negeri mencakup mekanisme dan proses yang dilakukan oleh suatu sistem politik suatu negara dalam menanggapi dunia eksternalnya. Mekanisme dan proses pembuatan politik luar negeri dilakukan oleh sistem politik internal negara. Sedangkan kondisi eksternal negara juga turut mempengaruhi pembuatan politik luar negeri. Terdapat 3 elemen dasar politik luar negeri; 1) mekanisme dan sistem, 2) lingkungan eksternal, 3) tujuan yang ingin diraih.

Pada dasarnya politik luar negeri adalah keputusan nasional atau kebijakan nasional suatu negara, hanya saja politik luar negeri ditujukan kepada aktor-aktor diluar batas yuridiksi suatu negara¹². Sehingga, politik luar negeri merupakan cara bagi suatu negara untuk berinteraksi dengan aktor-aktor diluar batas negaranya sendiri. Sekumpulan

¹¹ Anon, "BAB II TINJAUAN PUSTAKA", <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-fuqohanim4-22706-6-i-bab-i.pdf>, h. 41, dikunjungi pada tanggal 11 September 2018.

¹² I. G. Wahyu Wicaksana, "'A Guide to Theory": Epistemologi Politik Luar Negeri', *Global dan Strategis*, Th. I, No. 1, 2007, h. 12-19.

kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya yang ditujukan kepada entitas diluarnya baik negara maupun non-negara dalam rangka mencapai kepentingan yang ingin dicapai.

Perumusan politik luar negeri ditentukan dengan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal suatu negara. Konstitusi merupakan dasar bagi suatu negara untuk merumuskan politik luar negerinya. Kemudian dari mandat konstitusi tersebut, pemerintah suatu negara menafsirkannya dan melaksanakannya dengan membuat suatu kebijakan yang kemudian ditujukan kepada dunia eksternalnya untuk mendapatkan kepentingan negara yang diinginkan. Kondisi eksternal suatu negara menuntut reaksi negara tersebut, kemudian mempengaruhi dan dituangkan juga dalam politik luar negerinya.

Sedangkan menurut William D Coplin, terdapat empat determinan dalam penentuan politik luar negeri yaitu: *Pertama*, konteks internasional. Artinya situasi politik internasional atau kondisi eksternal dari suatu negara dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. *Kedua*, perilaku para pengambil keputusan. Perilaku pemerintahan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, pengalaman dan kepentingan individu-individu didalamnya juga dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. *Ketiga*, kondisi ekonomi dan militer. Kondisi ekonomi dan militer merupakan sisi dari dalam negara yang turut dapat mempengaruhi politik luar negeri. *Keempat*, politik dalam negeri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan atau politik luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik yang datang dari dalam maupun dari luar suatu negara¹³.

Malaysia sebagai negara merdeka memiliki rumusan politik luar negerinya yang telah dimandatkan dalam konstitusi

¹³ Anon, *Op.Cit.*, h. 43.

negaranya yaitu Konstitusi Federal Malaysia. Politik luar negeri Malaysia didirikan atas dasar nilai perdamaian, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Politik luar negeri Malaysia dibentuk atas tiga faktor kunci utama yaitu posisi strategisnya yang berada di wilayah Asia Tenggara, Malaysia sebagai bangsa pedagang, juga karena demografinya atau komposisi masyarakatnya yang unik. Pembuatan kebijakan politik dipandu dengan kriteria kredibilitas bersama dengan konsistensi (ketetapan) dan koheren(bersangkut-paut)¹⁴. Politik luar negeri Malaysia didasarkan pada terbentuknya hubungan persahabatan dan kekerabatan yang baik dengan negara-negara yang ada dalam komunitas bangsa-bangsa. Hubungan-hubungan ini dibentuk dengan tetap menghormati urusan dalam negeri negara-negara lain dan menganjurkan kebijakan yang tidak melakukan intervensi dengan menyadari kedaulatan bangsa-bangsa. Prinsip yang dipegang oleh politik luar negeri Malaysia lebih kepada dengan mengikat perjanjian dan kerjasama, bukan dengan isolasionisme dan aksi sepihak. Kemudian prinsip dasar politik luar negeri Malaysia yaitu persamaan kedaulatan, saling menghormati integritas teritorial, penyelesaian perselisihan dengan cara damai, dan juga menciptakan hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara lain¹⁵.

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs Malaysia, "MALAYSIA'S FOREIGN POLICY", [¹⁵ Ministry of Foreign Affairs Malaysia I, *Loc.Cit.*](http://www.kln.gov.my/web/guest/foreign_policy?p_p_id=56_INSTANCE_p5AN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_p5AN_struts_action=%2Fjournal_content%2Fview&_56_INSTANCE_p5AN_groupId=11032&_56_INSTANCE_p5AN_articleId=6441434&_56_INSTANCE_p5AN_viewMode=print, h.1, dikunjungi pada tanggal 9 September 2018</p></div><div data-bbox=)

Tujuan dari politik luar negeri Malaysia adalah untuk melindungi kedaulatan Malaysia dan kepentingan nasionalnya, juga turut berkontribusi berarti terhadap komunitas bangsa-bangsa yang adil dan setara dengan melakukan diplomasi yang efektif. Politik luar negeri Malaysia juga dapat dikatakan bertujuan agar kedaulatannya dan kesejahteraan ekonominya dapat dipertahankan dan terlindungi. Hal ini dapat dicapai dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan mempromosikan perdamaian universal; membina hubungan persahabatan dengan negara-negara asing dan melindungi kepentingan nasional Malaysia didalam level regional maupun internasional. Melalui politik luar negerinya juga, Malaysia berkomitmen untuk melakukan mandat dari dunia internasional dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia.

Malaysia melakukan politik luar negerinya dengan cukup aktif membina hubungan persahabatan baik secara bilateral maupun multilateral, dalam tingkat regional maupun internasional. Malaysia telah membina hubungan baik dengan banyak negara-negara asing. Malaysia juga aktif dalam organisasi antar negara pada tingkat regional maupun internasional. Banyak juga program-program yang dibuat oleh Malaysia sebagai bentuk dari implementasi politik luar negerinya.

Malaysia telah masuk ke berbagai sarana untuk melakukan politik luar negerinya yaitu seperti melalui; *Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)*, pendampingan humanitarian secara bilateral, dan melakukan program-program diplomasi publik. Malaysia juga aktif dalam berbagai forum-forum regional maupun internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam, gerakan *Non-Alligment Movement (Gerakan Non-Blok)*, *The Commonwealth, Group of Seventy Seven(G77)*,

*Developing Eight (D8), Asia Middle East Dialogue (AMED), Far East Asia Latin America Cooperation (FEALAC), Indian Ocean Rim Association (IORA), Asia Europe Meeting (ASEM) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Sarana lain yaitu dengan membangun hubungan dalam Brunei-Indonesia-Malaysia-the Phillipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT)*¹⁶.

B. MASUKNYA MALAYSIA ke DALAM ASEAN

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) adalah salah satu sasaran yang digunakan Malaysia untuk melakukan implementasi dari politik luar negerinya. Malaysia juga merupakan salah satu dari negara yang mendirikan ASEAN bersama dengan empat negara lain yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Kemudian Malaysia turut bergabung kedalam ASEAN bersama empat negara pendiri ASEAN yang lain.

Awalnya ide pembentukan organisasi antar pemerintah negara di kawasan Asia Tenggara diprakarsai oleh Thanat Khoman dari Thailand yang kemudian berdiskusi bersama Adam Malik dari Indonesia. Ketika perundingan pembahasan pembentukan organisasi hendak dilaksanakan, Thanat Khoman mengundang negara-negara yang dulu bersatu dalam ASA (*Association of Southeast Asia*) yaitu Malaysia dan Filipina, juga mengundang Indonesia. Singapura yang awalnya tidak direncanakan untuk ikut berunding kemudian mengajukan dirinya untuk ikut dalam pembentukan itu¹⁷. Perundingan tersebut kemudian digelar oleh kelima negara tersebut hingga menghasilkan dokumen bernama Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration yang mana kemudian

¹⁶Ministry of Foreign Affairs Malaysia II, *Loc. Cit.*

¹⁷Jamil Maidan Flores dan Jun Abad, "The Founding of ASEAN", <https://asean.org/asean/about-asean/history/>, h. 1, dikunjungi pada tanggal 9 September 2018

kelima negara tersebut menandatangani dokumen itu bersama-sama.

Penandatanganan Malaysia didalam dokumen Deklarasi Bangkok tersebut menandakan bahwa ASEAN cukup penting bagi Malaysia sehingga menjadikan ASEAN sebagai jalur untuk melakukan implementasi politik luar negerinya.. Keputusan Malaysia yang turut menjadikan ASEAN sebagai sarana atau jalur untuk melaksanakan politik luar negerinya dapat diketahui dari gambaran politik luar negeri Malaysia dimana posisi strategis Malaysia yang berada di Asia Tenggara adalah salah satu faktor kunci perumusan politik luar negeri Malaysia. Kemudian Malaysia juga berkomitmen untuk aktif pada tingkat regional dalam rangka melakukan aktivitas politik luar negerinya. Dengan berdasarkan hal itu juga sudah menjadi kewajaran jika Malaysia menjadikan ASEAN sebagai jalur implementasi politik luar negerinya. Diharapkan dengan ikut membangun dan aktif dalam ASEAN , Malaysia dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya karena adanya kesamaan tujuan yang dimilikinya dengan ASEAN. Sehingga Malaysia dapat mempertahankan kedaulatannya, meningkatkan perekonomian negaranya dengan menciptakan kerjasama erat dengan negara-negara lain didalam ASEAN, juga dapat membantu dalam menciptakan perdamaian dan keamanan didalam kawasan Asia Tenggara. Tentu hal-hal ini Malaysia lakukan dengan prinsip-prinsip yang ada dinegaranya seperti yang sudah tertuang dalam prinsip-prinsip politik luar negeri Malaysia diatas, juga dilakukan dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama dalam Piagam ASEAN.

C. ASEAN dan PRINSIP-PRINSIP DASARNYA

Jauh sebelum ASEAN terbentuk, telah ada beberapa organisasi kerjasama antar negara yang ada di Asia Tenggara namun selalu berakhir dengan kegagalan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Kerjasama antar negara di Kawasan atau regional Asia Tenggara dimulai dengan munculnya ide pembentukan SEAFET (*South East Asia Friendship and*

Economic Treaty). Ide ini muncul saat Malaysia selesai mengadakan pertemuan dengan Filipina pada Januari 1959. Kerjasama dalam SEAFET lebih dangkal yaitu hanya pada kerjasama dibidang ekonomi, perdagangan dan pendidikan. Namun ide ini gagal direalisasikan karena adanya ketidaksetujuan beberapa negara lain yang ada di Asia Tenggara. Namun ide pembentukan SEAFET ini menginspirasi pembentukan ASEAN. Walaupun pembentukan SEAFET gagal, kegagalan tersebut memiliki dampak positif yaitu terbentuknya organisasi regional yang lain antar bangsa di Asia Tenggara yaitu ASA (*Association of Southeast Asia*) yang terbentuk pada 31 Juli 1961. ASA hanya berisi tiga negara saja yaitu: Malaya, Thailand, dan Filipina. ASA memiliki tujuan yaitu menciptakan perdamaian dan stabilitas regional, juga mengusahakan kerjasama dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan sosial dan budaya, serta menyediakan fasilitas untuk pelatihan dan penelitian yang diharapkan akan berguna untuk semua orang. Namun, ASA mengalami kegagalan untuk bertahan lebih lama. Setelah kegagalan ASA, organisasi regional lain kembali terbentuk dengan nama MAPHILINDO yang berisi tiga negara yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Terbentuknya MAPHILINDO memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kerjasama pada bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan sosial. MAPHILINDO kembali menemui kegagalan untuk bertahan lama. Setelah MAPHILINDO gagal, masing-masing negara-negara di Asia Tenggara hanya memusatkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas negara mereka sendiri. Hal ini menyebabkan kondisi di regional Asia Tenggara dalam ketegangan, serta memunculkan konflik antar negara di wilayah Asia Tenggara contohnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Namun setelah ketegangan usai, negara-negara di Asia Tenggara kembali berusaha mengadakan perbaikan hubungan antar mereka. Akhirnya, terselenggaralah konferensi di Bangkok, Thailand yang dilakukan oleh para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara. Dari konferensi Bangkok tersebut kemudian

menghasilkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 yang mana deklarasi tersebut berakhir dengan terbentuknya ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*)¹⁸. Hingga kini ASEAN telah berhasil menyatukan sepuluh negara di kawasan atau regional Asia Tenggara dengan menjadikan mereka memiliki dan bergerak dalam satu visi yang sama, satu identitas yang sama, dan satu komunitas yang sama. Seperti motto ASEAN yaitu *One Vision, One Identity, One Community*. Jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional Asia Tenggara lain yang telah terbentuk lebih dahulu, bisa dikatakan bahwa ASEAN memiliki umur yang lebih panjang. Tepatnya sudah 51 tahun sejak dilakukannya Deklarasi Bangkok.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi antar negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh 5 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Tepatnya, perundingan pembentukan organisasi ASEAN dilakukan oleh Tun Abdul Razak dari Malaysia, Adam Malik dari Indonesia, S. Rajaratnam dari Singapura, Thanat Khoman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Pada awalnya anggota ASEAN hanya berisi kelima negara pendiri saja. Namun dikarenakan ASEAN sangat terbuka bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang ingin bergabung, keanggotaan ASEAN terus bertambah. Brunei Darussalam bergabung ke dalam ASEAN pada 1984. Vietnam bergabung pada Juli 1995. Bergabungnya Vietnam tersebut mempengaruhi negara-negara Indochina lainnya. Kemudian Laos bergabung pada tahun 1997. Akhirnya Myanmar dan Kamboja juga bergabung pada tahun 1999. Sehingga saat ini, sudah ada total 10 negara yang bergabung ke dalam ASEAN.

¹⁸ Mohamad Fisol Keling et al., 'The Development of ASEAN from Historical Approach', *Asian Social Science*, Vol 7, No 7, 2011, h. 169-189

Asosiasi ini adalah asosiasi kerjasama antar pemerintah negara di kawasan Asia Tenggara yang bukan merupakan organisasi kerjasama militer. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan para *Founding Fathers* atau para pendiri ASEAN yang disampaikan dalam pidato resmi saat peresmian Deklarasi Bangkok¹⁹. Dalam pidato itu juga mereka menyampaikan tentang tantangan yang dihadapi dan hal-hal yang harus dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara agar bisa mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang positif diberbagai bidang serta harapan dan cita-cita mereka terhadap pembentukan ASEAN.

Seperti halnya delegasi dari Filipina, Narcisco Ramos menyampaikan bahwa perekonomian Asia Tenggara saat itu terpecah-pecah, masing-masing negara mengejar kepentingan mereka sendiri yang penuh keterbatasan dan menghambur-hamburkan sumber daya mereka yang kecil. Bahkan pertentangan keras yang terjadi antar negara yang sudah berhubungan baik membawa bibit kelemahan mereka sendiri dalam ketidakmampuan untuk bertumbuh dan juga kerelaan mereka bergantung pada bangsa-bangsa industri dan maju. Beliau mengatakan bahwa ASEAN seharusnya dapat memimpin pemanfaatan potensi yang belum dimanfaatkan di kawasan yang sangat kaya ini melalui tindakan nyata dalam persatuan yang kuat.

Delegasi dari Indonesia, Adam Malik menyatakan bahwa ASEAN dibentuk dalam rangka membangun asosiasi untuk kerjasama regional. Beliau menyampaikan visi Indonesia terhadap Asia Tenggara yang harus berkembang menjadi regional atau kawasan yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri serta cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dari pengaruh buruk dari luar kawasan dan tentu saja hal itu bukanlah angan-angan belaka jika negara-negara di kawasan Asia Tenggara mampu untuk saling bekerjasama

¹⁹ Flores dan Abad, *Loc.Cit.*

secara efektif dengan mengingat sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka. Menurutnya dalam kehidupan kedepan tentu akan ditemui perbedaan pendapat atau pandangan antar negara-negara anggota ASEAN, namun perbedaan itu dapat diatasi dengan niat baik dan saling memahami, saling mempercayai, begitu juga kerja keras, kesabaran dan ketekunan juga sangat penting dilakukan.

Tun Abdul Razak sebagai perwakilan dari Malaysia menyampaikan bahwa orang-orang di wilayah Asia Tenggara harus bersama-sama dan membentuk sebuah sudut pandang baru dan kerangka kesatuan yang ditentukan oleh orang-orang Asia Tenggara sendiri. Beliau menekankan bahwa masyarakat Asia Tenggara baik secara individu maupun bersama-sama harus sadar bahwa masyarakat Asia Tenggara tidak akan mampu bertahan hidup lama dan mandiri kecuali jika mereka berpikir dan bertindak secara bersama-sama sebagai keluarga besar masyarakat Asia Tenggara, yang juga terikat dalam persahabatan dan niat baik serta menjiwai idealisme dan aspirasi mereka sendiri yang bertekad membentuk takdir mereka sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa dengan pembentukan ASEAN adalah bukti kuat untuk berada di jalan itu.

Perwakilan Singapura, S. Rajaratnam menyampaikan bahwa ASEAN dibentuk untuk memastikan wilayah Asia Tenggara yang stabil, bagi negara-negara yang tertarik dalam hal kestabilan Asia Tenggara, kemakmuran Asia Tenggara, dan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial yang baik, bahwa ASEAN akan menyambut mereka untuk turut menggunakan sumber daya dan kebijaksanaan mereka demi berkontribusi positif terhadap perdamaian dunia.

Thanat Khoman menyampaikan bahwa ASEAN dibuat bukan untuk menghancurkan. Beliau merinci tujuan ASEAN adalah untuk membangun masyarakat baru yang akan tanggap terhadap kebutuhan sesungguhnya yang diperlukan dan efektif dalam mewujudkannya, untuk membangun kebahagiaan dan

peningkatan aspek material begitu juga aspek spiritual masyarakat Asia Tenggara, juga peningkatan kondisi stabilitas dan kemajuannya. Dalam pidatonya beliau juga mengatakan untuk mencegah upaya menghilangkan kebebasan dan kedaulatan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka negara-negara tersebut harus terlebih dulu membebaskan diri mereka sendiri kebodohan, penyakit dan kelaparan. Lalu beliau mengatakan bahwa hal itu tidak akan bisa dicapai oleh masing-masing negara sendirian kecuali jika mereka semua bergabung dan saling bekerjasama dengan mereka yang memiliki kesamaan cita-cita.

Bisa dikatakan secara singkat bahwa para pendiri ASEAN tersebut ingin menyampaikan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti kebodohan, wabah penyakit, kelaparan, buruknya hubungan antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, pengaruh negatif yang datang dari luar Asia Tenggara, dan ketergantungan negara-negara itu terhadap negara-negara maju dan industri. Mereka menyampaikan juga bahwa solusi dari itu semua adalah bersatunya semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, bersama-sama membentuk ikatan yang akan menjadikan negara-negara di Asia Tenggara saling membantu satu sama lain dengan tujuan agar masyarakat Asia Tenggara bisa menjadi mandiri dan berdiri dengan kakinya sendiri, serta kawasan tempat mereka tinggal bisa dalam keadaan yang kondusif dan baik, agar mereka juga bisa sejahtera dalam hal materi dan spiritualnya.

Berdasarkan *ASEAN Charter* atau Piagam ASEAN, menyatakan bahwa tujuan dari ASEAN antara lain: menjaga peningkatan perdamaian, keamanan, stabilitas dan nilai-nilai perdamaian di kawasan; meningkatkan ketahanan regional dengan cara mendorong kerjasama yang lebih baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya; mempertahankan wilayah Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir dan bebas dari semua senjata-senjata pemusnah massal lainnya; untuk memastikan bahwa orang-orang dan negara-negara

anggota ASEAN hidup dalam damai dengan dunia pada umumnya dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmoni; menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, sejahtera, bernilai kompetitif tinggi dan terintegrasi secara ekonomi dengan memfasilitasi secara efektif untuk perdagangan dan investasi yang mana ditandai adanya kebebasan arus barang, jasa dan investasi serta memfasilitasi bergeraknya orang-orang yang bergerak dibidang bisnis, orang-orang profesional, orang-orang berbakat, dan pekerja, serta membebaskan aliran modal; meringankan kemiskinan dan memperkecil celah tingkat perbedaan dalam pembangunan yang ada di dalam ASEAN melalui rasa saling membantu dan kerjasama; memperkuat demokrasi, meningkatkan kinerja pemerintahan dan peraturan hukum yang baik, memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan mendasar dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab dari negara-negara anggota ASEAN; menanggapi secara efektif segala bentuk ancaman, kejahatan transnasional, dan tantangan-tantangan yang menyangkut lintas batas sesuai dengan prinsip keamanan yang komprehensif; memajukan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat memastikan perlindungan terhadap lingkungan yang ada di kawasan, memastikan keberlangsungan sumber daya alamnya, memastikan lestariannya peninggalan budaya dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi orang-orang; mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama di bidang pendidikan dan semangat terus belajar, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memberdayakan orang-orang ASEAN dan untuk memperkuat Komunitas ASEAN; meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat ASEAN dengan cara menyediakan akses yang adil terhadap kesempatan untuk pengembangan diri manusia, kesejahteraan sosial dan keadilan; memperkuat kerjasama dalam membangun lingkungan yang sejahtera, aman, dan bebas obat-obatan terlarang bagi masyarakat ASEAN; untuk memajukan ASEAN yang berorientasi pada masyarakatnya dalam semua sektor sosial yang didorong untuk ikut masuk berpartisipasi dan

mengambil manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; untuk memajukan identitas ASEAN melalui pembinaan kesadaran yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan warisan yang ada di kawasan; untuk menjaga peran yang sangat aktif dan terpusat dari ASEAN sebagai penggerak utama hubungan-hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal diluarnya dalam rancangan regional yang terbuka, transparan, dan inklusif²⁰.

Dapat dipahami dari tujuan-tujuan ASEAN yang terdapat pada ASEAN Charter diatas bahwa ASEAN dibentuk untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang aman, damai, bebas dari adanya kepemilikan senjata nuklir, bebas dari segala macam bentuk senjata pemusnah massal, memiliki stabilitas yang baik. Negara-negara anggota ASEAN diharapkan juga untuk cepat tanggap dan saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara yang mengancam kawasan Asia Tenggara agar keamanan dapat turut dicapai. Untuk mencapai hal-hal itu juga, negara anggota ASEAN saling bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya. Tidak lupa juga ASEAN memperhatikan kebaikan untuk orang-orang didalamnya dengan menjadikan mereka mudah mengakses segala hal yang dapat membangun diri mereka sendiri, agar mereka dapat mencari penghidupan yang layak. ASEAN juga turut membuka pasar tunggal dimana kebebasan barang, jasa, dan investasi dapat dilakukan, dan kebebasan perpindahan masyarakat biasa, orang-orang profesional, orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Lingkungan alam dan warisan-warisan budaya peninggalan nenek moyang terdahulu dari masyarakat yang ada di ASEAN juga turut dilindungi untuk kebaikan masa depan ASEAN. Saling tolong-menolong antar negara anggota ASEAN ketika

²⁰ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Charter*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 2008, h. 3-5.

ada masalah yang dihadapi oleh negara anggota tertentu. Saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan bersama. ASEAN dibangun atas semangat keadilan, kesetaraan, saling menghormati kedaulatan antar sesama negara anggota, saling melindungi, saling tolong menolong, dan semangat perdamaian. Semua itu dimaksudkan agar ASEAN menjadi regional yang mampu mandiri dan maju disegala bidang secara bersama-sama.

Seperti yang telah disampaikan diatas tentang tujuan-tujuan ASEAN, dari hal-hal itu kita bisa mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan itu maka seluruh negara-negara anggota ASEAN akan saling berhubungan dan saling bekerjasama dimana bentuk dari hubungan atau kerjasama yang dilakukan dapat berupa deklarasi, perjanjian, konvensi, kesepakatan, pakta dan bentuk-bentuk instrumen lainnya. Dalam melakukan hubungan dan kerjasama tersebut, ASEAN telah menentukan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang, dipatuhi dan dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN di setiap deklarasi, perjanjian, konvensi, kesepakatan, pakta dan bentuk-bentuk instrumen hubungan dan kerjasama lainnya yang akan dilakukan didalam ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN harus berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera didalam ASEAN Charter, antara lain: menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas(kesatuan) teritorial dan identitas nasional dari semua negara-negara anggota ASEAN; berkomitmen bersama dan bertanggung jawab bersama dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional; penolakan terhadap agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lain yang dengan cara apapun tidak konsisten terhadap hukum internasional; berpegang pada penyelesaian perselisihan dengan cara damai; tidak ikut campur tangan kedalam urusan internal sesama negara-negara anggota ASEAN; menghormati hak setiap negara-negara anggota ASEAN untuk memimpin sendiri kehidupan negaranya bebas dari campur tangan, subversi dan

kekerasan yang berasal dari luar; ditingkatkannya konsultasi dalam hal-hal serius yang mempengaruhi kepentingan bersama dari ASEAN; taat pada peraturan hukum, tata pemerintahan, dan prinsip-prinsip dari demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional; menghormati kebebasan dasar, memajukan dan melindungi HAM, dan memajukan keadilan sosial; menegakkan Piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humanitarian internasional, yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN; menolak berpartisipasi dalam berbagai kebijakan atau aktivitas, termasuk penggunaan teritorialnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN; saling menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN sambil menekankan nilai-nilai bersama dengan semangat persatuan dalam keberagaman; sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan keluar, inklusif, dan non-diskriminatif; berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif kearah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar²¹.

Negara-negara anggota ASEAN melakukan interaksi antar mereka dengan memegang prinsip-prinsip dasar tersebut agar interaksi yang tercipta antar mereka bisa menjadikan tercapainya tujuan-tujuan ASEAN. Mereka bersama-sama memegang prinsip yang saling menghormati terhadap kedaulatan antar sesama anggota ASEAN. Intervensi baik dari luar ASEAN maupun intervensi dari sesama anggota ASEAN terhadap urusan dalam negeri negara anggota ASEAN juga

²¹ *Ibid*, h. 5-7

dilarang untuk dilakukan. Mereka juga menolak segala macam tindakan dari berbagai aktor yang akan membahayakan kondisi ASEAN. Saling toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ditemui didalam masyarakat ASEAN akan membuat mereka bersatu dalam keberagaman sehingga bisa fokus terhadap tujuan ASEAN. Komitmen untuk melakukan semua perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antar mereka juga merupakan prinsip yang dipegang.

Malaysia yang merupakan negara anggota ASEAN juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar ASEAN tersebut ketika menjalankan politik luar negerinya kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya. Bahwa ketika Malaysia hendak melakukan politik luar negerinya kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya, maka Malaysia harus menghormati kedaulatan negara anggota ASEAN yang dijadikan sasaran politik luar negerinya. Malaysia juga tidak boleh mencampuri atau melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggota ASEAN lainnya. Harus turut serta menjunjung sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di ASEAN. Kemudian Malaysia juga tidak boleh ikut mendukung atau terlibat langsung dalam aktivitas aktor-aktor lain yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan ASEAN. Malaysia juga harus berkomitmen untuk melakukan semua kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama dengan anggota ASEAN lainnya.